

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian negara dan dalam penyediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan sektor ini. Selanjutnya bahwa dalam proses pembangunan pertanian, berbagai tantangan sering muncul. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi adalah meningkatnya permintaan pangan yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan produksi. Permintaan pangan tersebut terus bertumbuh seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Pembangunan ekonomi pertanian di wilayah pedesaan idealnya dijadikan sebagai fokus dan target pembangunan. Sebab, sebagian besar penduduk di Indonesia bermukim di pedesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Fenomena lain diakui bahwa sektor pertanian di wilayah pedesaan sebagian besar dikelola sang petani menggunakan skala usaha yang relatif sempit. Skala pengusaha pertanian yang kecil merusak petani meningkatkan pendapatannya sehingga sulit keluar dari lingkungan kemiskinan. Kondisi rakyat petani yang miskin selain luas usaha taninya yang sempit, disebabkan produktivitas rendah, infrastruktur terbatas, aksesibilitas rendah terhadap kapital, teknologi, informasi, dan pasar serta rendahnya kapasitas petani. Di sisi lain, petani mempunyai sedikit kesempatan untuk memanfaatkan saat luang bagi pengusaha di luar pertanian (Anantanyu *et al*, 2009).

Sejalan dengan orientasi pembangunan pertanian di Indonesia saat ini yang berfokus pada sistem agribisnis, peran kelembagaan pertanian termasuk kelembagaan petani sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor ini. Kelembagaan petani dipedesaan memainkan peran penting dalam mempercepat perkembangan sosial-ekonomi petani, meningkatkan akses ke modal, infrastruktur, pasar, serta mendukung adopsi inovasi pertanian. Selain itu, keberadaan kelembagaan petani memudahkan pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam memberikan dukungan serta memperkuat posisi petani.

Peranan kelembagaan pertanian baik berupa Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), termasuk didalamnya kelembagaan petani lainnya, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi pada percepatan pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas di kapital, infrastruktur, pasar, serta adopsi penemuan-penemuan pertanian. Sementara itu, eksistensi kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah serta pemangku kepentingan yang lain difasilitasi serta menyampaikan penguatan di petani. Selanjutnya dinyatakan bahwa Gapoktan berperan penting guna mengatasi dilema bersama pada usaha dan menguatkan usaha tawar petani, baik dalam pasar wahana (sistim tertentu) maupun dalam pasar produk pertanian (Rachmat, 2013). Perkembangan gabungan kelompok tani di Indonesia saat ini tidak diciptakan oleh dan buat petani, melainkan diciptakan untuk respon dari kegiatan-kegiatan pemerintah yg mengharuskan petani berkelompok. (Ramdhani, 2015).

Sektor pertanian mendapatkan perhatian besar dari pemerintah karena merupakan salah satu sumber penghidupan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum (Rahman & Usman, 2018). Salah satunya adalah kebijakan yang mencakup program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Program tersebut bertujuan untuk memberdayakan petani melalui peran pemerintah dan lembaga terkait yang bekerja sama dalam kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan petani serta mengurangi angka kemiskinan dipedesaan (Lifa *et al*, 2015).

Melihat kondisi saat ini, banyak kelembagaan pangan yang tidak berjalan sesuai harapan dan cenderung stagnan, serta tidak berkembang dalam melaksanakan usahanya, usaha yang dijalankan tidak efisien dan tidak mencapai titik pulang pokok yang seharusnya menjadi persyaratan bagi setiap pelaku usaha. Padahal kelembagaan tersebut memiliki potensi komoditas unggulan yang bisa dikembangkan. Masalah utama yang menghambat perkembangan ini adalah kurangnya akses terhadap informasi, minimnya komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dan terbatasnya akses ke pasar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi usaha yang lebih baik dan jaringan kerjasama antar gapoktan. Kelemahan

Gapoktan dalam menggerakkan ekonomi terletak pada manajemen yang lemah, terbatasnya modal, dan kurangnya teknologi dalam pengelolaan usaha.

Selanjutnya dinyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain lemahnya akses terhadap sumber permodalan, distribusi dan pemasaran. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah perlu memfasilitasi dan menjembatani, salah satunya dengan kerjasama dalam bentuk pola kemitraan antara masyarakat dalam hal ini poktan/gapoktan dengan dunia usaha. Kemitraan dihakikatnya ialah wujud ideal didasari atas hubungan antar pelaku bertumpu pada ikatan perjuangan saling menunjang serta saling menguntungkan, saling menghidupi sesuai asas kesetaraan dan kebersamaan.

Meskipun kelembagaan mempunyai fungsi strategis, tetapi berdasarkan Soekartawi *et al* (2001), aspek kelembagaan, baik kelembagaan formal juga kelembagaan non formal justru adalah aspek menonjol yang dapat mengganggu jalannya pembangunan pertanian pada negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini terjadi karena masih banyaknya kelembagaan ini belum optimal yang terdapat pada negara-negara berkembang termasuk pada Indonesia. Padahal kelembagaan memegang peranan utama pada keberhasilan pembangunan pertanian serta pedesaan.

Berkembangnya usaha kelembagaan pangan bertitik tolak pada adanya kerjasama usaha antar Gapoktan dan dengan pelaku usaha agar Gapoktan mampu bersaing dalam memperoleh pasar. Untuk itu Gapoktan harus mampu melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam organisasi agar sejalan dengan perubahan dan perkembangan situasi saat ini. Sejalan dengan itu, pemerintah berkewajiban menciptakan iklim dan kondisi yang bertujuan untuk mendorong, membimbing, memfasilitasi, memberikan perlindungan serta membina kerjasama antar Gapoktan dan Gapoktan dengan pelaku usaha sehingga menjadi kelembagaan yang berbasiskan agribisnis dan agroindustri.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, pemerintah telah melakukan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan fokus pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memberdayakan petani melalui peran pemerintah dan lembaga terkait yang

bekerjasama dalam kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan petani serta mengurangi angka kemiskinan dipedesaan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut di atas maka salah satu kelembagaan petani (Gapoktan) yang diharapkan tersebut dan telah mendapatkan fasilitasi, perlindungan dan pembinaan dari pemerintah melalui OPD terkait Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten, khususnya melalui OPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan dinas terkait Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani anggota dan masyarakat adalah **KSU Gapoktan Albasiko II** yang berlokasi di Nagari Padang Canduh, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya bahwa KSU Gapoktan Albasiko II ini dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah karena berdasarkan hasil monitoring dari OPD dan Dinas terkait provinsi dan kabupaten bahwa Gapoktan tersebut telah menunjukkan peran yang besar dalam upaya meningkatkan dan pengembangan usaha di beberapa sektor pertanian dan perekonomian dengan beberapa unit usaha yang sudah dibentuk.

B. Rumusan Masalah

Gabungan kelompok tani (Gapoktan) perlu dibantu karena mereka berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mengembangkan sektor pertanian. Bantuan dapat berupa :

1. Penguatan kelembagaan : pemerintah dan Lembaga terkait perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus Gapoktan agar mereka memiliki kemampuan manajerial dan organisasi kuat.
2. Akses permodalan : memberikan kemudahan akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau skema pembiayaan lain yang sesuai dengan kebutuhan petani.
3. Penyediaan sarana produksi ; memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida yang berkualitas dan terjangkau melalui distribusi yang efektif.
4. Peningkatan pemasaran ; membantu Gapoktan dalam memasarkan produksi pertanian mereka melalui pembentukan jaringan pemasaran, kemitraan dengan industry hilir, dan promosi produk.

5. Transfer teknologi ; memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penerapan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), teknik budidaya yang efisien, dan system informasi pertanian.
6. Fasilitasi kerjasama ; memfasilitasi kerjasama antara Gapoktan dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta, untuk pengembangan inovasi dan teknologi.

Gapoktan membantu petani mengatasi keterbatasan skala usaha, akses pasar, dan permodalan melalui pendekatan kelompok. Dengan bantuan yang tepat, Gapoktan dapat menjadi tulang punggung pembangunan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

KSU Gapoktan Albasiko II yang berada di di Nagari Padang Canduh, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat merupakan Gapoktan yang telah melalui evaluasi dengan memenuhi syarat umum memiliki kriteria antara lain :

1. Beranggotakan 14 kelompok tani yang aktif. Keanggotaan awalnya tahun 2009 hanya 6 (enam) kelompok tani, ditahun 2010 menjadi 7 (tujuh) kelompok tani, tahun 2014 bertambah 3 (tiga) kelompok tani dan pada September 2017 bertambah lagi, sehingga total kelompok tani saat ini yaitu sebanyak 14 (empat belas) kelompok tani. Berikut nama kelompok tani KSU Gapoktan Albasiko II.
2. Memiliki usaha yang sama atau saling berkaitan.
Anggota KSU Gapoktan Albasiko II adalah merupakan pekebun kelapa sawit, sawah, wiraswasta dan juga peternak.
3. Adanya kesepakatan seluruh anggota kelompok tani untuk membentuk Gapoktan.
4. Adanya pertemuan/ rapat anggota/ pengurus yang berkala dan disusunnya rencana kerja yang dilaksanakan secara bersama.
5. KSU Gapoktan Albasiko II rutin melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan juga pertemuan-pertemuan antar anggota kelompok tani setiap bulannya.
6. Memiliki aturan/ norma yang disepakati dan ditaati bersama.
7. Memfasilitasi kegiatan usaha bersama dan pelayanan terhadap anggota kelompok tani.

8. Memiliki administrasi yang tercatat dengan rapi.
9. Dukungan dari tokoh masyarakat setempat.

Gapoktan bertujuan meningkatkan skala usaha tani para anggotanya sehingga lebih efisien dan menguntungkan. KSU Gapoktan Albasiko II memiliki beberapa unit usaha :

- a. Unit Usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).
- b. Unit Usaha Sarana Produksi (Saprodi) dan Sarana Produksi Pertanian (Saprota).
- c. Unit Usaha Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Warung Serba Ada (Waserda).
- d. Perbengkelan Sepeda Motor.
- e. Pertashop.
- f. Elektronik/ Counter.
- g. Rice Milling Unit (RMU).
- h. Ternak.

Dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh KSU Gapoktan Albasiko II, sebagai lembaga pertanian, apakah hubungan kausal antara perkembangan usaha KSU Gapoktan Albasiko II yang telah ada benar-benar berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan anggota. Penelitian ini untuk memahami seberapa efektif Gapoktan dalam mencapai tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani melalui perkembangan usaha.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas permasalahan yang ingin dirumuskan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan oleh KSU Gapoktan Albasiko II selama periode tertentu.
2. Bagaimana dampak perkembangan usaha tersebut terhadap kesejahteraan anggota KSU Gapoktan Albasiko II.

Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan tersebut berdasarkan bukti empiris maka, Penulis telah melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Perkembangan Usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Terhadap Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Pada KSU Gapoktan Albasiko II Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)”**.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh KSU Gapoktan Albasiko II selama periode tertentu.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perkembangan usaha KSU Gapoktan Albasiko II berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi proses pembelajaran dan pemahaman mengenai partisipasi. Selain itu dapat dijadikan referensi atau masukan untuk mengetahui sejauhmana hubungan tingkat partisipasi petani dengan kinerja Gapoktan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan usahanya melalui suatu program. Selain itu dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut sesuai masalah yang diteliti. Sementara bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan dikembangkan penelitian lebih lanjut dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian yang serupa.